

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era pembangunan nasional saat ini, keuangan pemerintah akan sangat menentukan arah pembangunan sosial dan ekonomi. Persediaan sumber daya keuangan yang terbatas serta kebutuhan pembangunan yang tidak terbatas mengharuskan pemerintah mengelola keuangannya secara efektif.

Pembangunan Nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa, khususnya pemerintah, dalam rangka mencapai tujuan bernegara, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu: *“Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; Memajukan kesejahteraan umum; Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan Ikut serta mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”*

Salah satu hal yang menjadi prioritas dalam pembangunan nasional adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan mencapai level 5,1 persen pada 2018. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dikisaran 5 persen merupakan pertumbuhan ekonomi baru. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar dapat menjaga fundamental

ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan ekonomi.

Dalam APBN, penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ditempuh dengan beberapa strategi, yaitu:

1. Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan penguatan daya saing;
2. Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya program - program prioritas di tengah tantangan perekonomian global;
3. Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka menengah dan panjang.

Sedangkan fokus dalam APBN, yaitu:

1. Pendapatan
 - a. Target penerimaan perpajakan direncanakan secara realistis dengan mendasarkan pada kondisi perekonomian terkini, dukungan pelaksanaan kebijakan dan langkah administratif perpajakan yang komprehensif serta *extra effort* dalam upaya memperkecil kesenjangan antara potensi penerimaan perpajakan dengan realisasinya.
 - b. Mengoptimalkan pengeluaran pemerintah dalam rangka mengurangi ketergantungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap faktor eksternal (ICP, kurs, dan harga komoditas).

2. Belanja Negara

- a. Melanjutkan program prioritas nasional (antara lain infrastruktur konektivitas, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan serta pertahanan) untuk memperbaiki kualitas pembangunan.
- b. Mempertahankan pemenuhan anggaran pendidikan dan anggaran kesehatan.
- c. Menyelaraskan kebijakan desentralisasi fiskal.

3. Pembiayaan Anggaran

- a. Mendukung pembangunan infrastruktur untuk transportasi, air bersih dan sanitasi, serta infrastruktur energi.
- b. Mengendalikan rasio utang pemerintah dalam batas yang aman.

Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari APBN. BUMN, ini dapat berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) atau Perusahaan Umum (Perum). BUMN menjadi salah satu bagian dalam penunjang pertumbuhan ekonomi karena termasuk dalam pengeluaran pembiayaan dalam APBN, sehingga BUMN perlu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik serta mendapatkan pengawasan dan penilaian, baik dari internal maupun eksternal.

Sistem pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal diterapkan pada organisasi yang berupaya menjaga dan mengarahkan organisasi sesuai dengan tujuan, strategi, serta nilai

organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Cohen, dkk (2008) bahwa pengendalian bukan masalah mengetahui dan mengarahkan segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi, dan menghindari semua kesalahan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh BUMN harus sesuai dengan ketentuan, Pengawasan dari internal misalnya dari Satuan Pengawasan Intern (SPI), sebagaimana disebutkan dalam pasal 28 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor 01 Tahun 2011.

PT Pos Indonesia adalah BUMN yang berbentuk persero, bergerak di bidang jasa kurir, logistic, dan transaksi keuangan. Saat ini, bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Dalam Sejarahnya PT Pos Indonesia merupakan salah satu BUMN tertua di Indonesia. Pasang surut mewarnai perjalanan panjang dua setengah abad Pos Indonesia. Masa-masa keemasan industri perposan ada di tahun-tahun 1970 hingga 1980-an. Masyarakat pengguna jasa pos sangat setia memanfaatkan layanan pos. Namun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan gaya hidup, serta trend liberalisasi bisnis jasa pos membuat Pos Indonesia mengalami pergeseran bisnis yang sangat signifikan. Seperti juga dialami banyak perusahaan pos di dunia, Pos Indonesia sempat mengalami penurunan kinerja usahanya di tahun 2000-2007. Bisnis suratpos di tahun-tahun tersebut menurun drastis. Penggunaan pesan singkat melalui telepon selular dan internet menggantikan peran surat pos individu. Demikian juga persaingan kiriman barang dengan para perusahaan kurir swasta membuat pangsa pasar Pos Indonesia tergerus. Keadaan tersebut memaksa Pos

Indonesia untuk berubah dan melakukan transformasi bisnis. Manajemen perusahaan mencanangkan masa kebangkitan perusahaan di tahun 2009 dan menyusun visi dan misi baru serta perencanaan jangka panjang untuk membangun kompetensi perusahaan agar lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui berbagai program transformasi internal dan bisnis perusahaan, pendapatan Pos Indonesia di tahun 2013 telah mencapai lebih dari 4 (empat) Triliun rupiah atau meningkat hampir tiga kali lipat dari periode 2006-2007. Lima tahun mendatang segenap pimpinan Pos Indonesia menargetkan pertumbuhan pendapatan perusahaan tiga kali lipat dari sekarang, menjadi 11 (sebelas) Triliun rupiah.

Di tahun 2013 ini, manajemen Pos Indonesia melanjutkan program transformasi yang telah dicanangkan sebelumnya. Fokus bisnis Pos Indonesia tidak lagi hanya di bisnis surat, paket dan jasa keuangan, tapi juga mengoptimalkan sumber-sumber bisnis baru, seperti logistik, properti, dan asuransi. Saat ini dapat dikatakan bahwa Pos Indonesia masih tetap sebagai salah satu perusahaan jasa dengan jaringan distribusi yang terbesar di Indonesia. Jumlah kantor pos lebih dari 4.000 kantor dengan sebarannya di 24.000 titik layanan dan telah mencakup 100 persen kota dan kabupaten di Indonesia serta telah menjangkau hampir seluruh kecamatan di tanah air. Pos Indonesia juga didukung oleh armada layanan bergerak sebanyak 418 unit, 10.523 unit kendaraan truk dan mobil dinas, 19.502 karyawan, 3.729 unit kantor pos *online*, serta 24.674 unit *point of sales*.

Dalam era k-economy pelaku usaha berlomba-lomba untuk menawarkan jasa yang lebih baik dari para pesaing. Ditambah lagi dengan rendahnya persyaratan minimum modal yang harus dimiliki dalam operasional bisnis pos dan

giro menyebabkan barrier to entry relatif rendah. Dengan sifat industri seperti ini maka persaingan menjadi sangat tajam dengan bermunculannya pesaing baik perusahaan global, nasional maupun berskala lokal. Sampai dengan saat ini terdaftar lebih dari 700 perusahaan swasta yang bergerak pada bidang usaha pos dan giro. Persaingan yang ketat membuat PTPI harus membuat pengendalian internal baik itu dalam anggaran pendapatan dan belanja maupun dalam bisnis agar konsumen tidak mudah mengalihkan pilihannya, PTPI dalam posisi yang sulit karena kompetensi telah tergantikan dengan produk-produk yang technology minded. Strategi pengendalian yang digunakan sangat menentukan masa depan PTPI selanjutnya dan sejalan dengan berubahnya status perusahaan dari perum menjadi persero yang memberi keleluasaan bagi perusahaan untuk memfokuskan pada pemupukan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Persaingan yang ketat ini juga membuat Perusahaan mengalami penurunan pendapatan PTPI, sedangkan biaya yang dikeluarkan tetap sama atau bahkan dapat meningkat.

Untuk mengurangi dampak buruk tersebut maka diperlukan rencana anggaran, perencanaan kegiatan dan realisasi yang tepat. Kemudian pengawasan atau evaluasi juga harus tetap dilakukan setelah proses penyusunan anggaran, yaitu terhadap realisasi anggaran atau belanja. Realisasi anggaran atau belanja juga rentan terhadap terjadinya tindak kecurangan. Kecurangan itu antara lain pelaksanaan kegiatan secara fiktif, pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan kriteria seharusnya dan berubahnya kegiatan yang dilaksanakan. Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kerugian finansial yang dialami oleh perusahaan. Untuk itu perlu memaksimalkan fungsi dari SPI.

Dari uraian masalah dan informasi diatas, dapat diringkas bahwa BUMN merupakan bagian dari pengeluaran pembiayaan dalam APBN, sehingga kinerjanya perlu mendapatkan pengendalian, pengawasan dan penilaian agar memberikan keuntungan bagi pemegang saham, yang nantinya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pelaksanaan Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pada PT Pos Indonesia (Cabang Kota Bandung)”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikembangkan serta diuraikan diatas, maka perumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis sebagai dasar dalam penulisan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah peranan pengendalian internal atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada PT Pos Indonesia?
2. Apakah terdapat pengaruh peranan pengendalian internal atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada PT Pos Indonesia?
3. Apakah terjadi penyimpangan saat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada PT Pos Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat oleh penulis, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui peranan pengendalian internal atas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada PT Pos Indonesia
2. Mengetahui penyimpangan yang terjadi saat pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja pada PT Pos Indonesia
3. Memberikan solusi untuk mengatasi penyimpangan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang akan dibuat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Pengembangan ilmu pengetahuan:

- a. Dapat memberikan informasi tambahan bagi para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang pengendalian intern dan BUMN, khususnya PT Pos Indonesia.
- b. Sebagai bahan referensi bagi yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut berkenaan dengan masalah ini.

2. Kegunaan Praktisi

Bagi lembaga-lembaga yang terkait:

- a. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Satuan Pengawas Intern PT Pos Indonesia dalam tugasnya untuk melakukan pengawasan intern,
- b. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi manajemen atau direksi PT Pos Indonesia dalam mengambil kebijakan terkait anggaran dan belanja.